

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018), UMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut (Hastuti & dkk, 2021). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa entitas mikro, kecil, dan menengah dibedakan berdasarkan jumlah aset, omset tahunan, serta jumlah tenaga kerja.

UMKM berperan dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai sekitar 64,2 juta unit, yang menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, setara dengan Rp.8.573,89 triliun (Santi, 2024). Selain kontribusi terhadap PDB, UMKM juga berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dan mendorong inovasi melalui kewirausahaan (Adhiat, 2025). Menurut (Ariyanto et al., 2021) menegaskan bahwa kewirausahaan yang banyak dilakukan oleh pelaku UMKM, adalah proses memanfaatkan peluang bisnis baru dengan risiko yang tinggi demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM, selain menjadi tulang punggung ekonomi lokal, juga memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan Pendapatan Domestik Bruto. Oleh karena itu pemerintah, dan para pemangku kepentingan perlu mengembangkan dan

memberdayakan UMKM secara optimal. Pengembangan dan pemerdayaan UMKM menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan perekonomian yang inklussif, khususnya di daerah-daerah dengan potensi perekonomian lokal yang besar. Untuk mendukung hal tersebut, dukungan kebijakan diperlukan agar sektor UMKM di Indonesia dapat bertumbuh secara berkelanjutan(Wiranata, 2023).

Pertumbuhan UMKM sendiri terdiri dari 4 sektor utama yakni sektor Perdagangan, Industri Pertanian, Industri Non Pertanian dan Aneka Jasa. Data dari (Dinas Koperasi, 2023) menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor dengan terbesar dari sektor lainnya, yakni mencapai 239.381 unit usaha, yang tentunya jauh melampaui sektor lain seperti sektor industri pertanian dengan jumlah 67.748 unit usaha, industri non-pertanian dengan jumlah 54.424 unit usaha, dan sektor aneka jasa dia angka 34.060 unit usaha. Dimana total kontribusi sektor perdagangan mencapai 60,5% dari seluruh populasi UMKM. Sektor perdagangan diminati karena hambatan yang masuk (*entry barrier*) yang relatif rendah, perputaran arus kas yang cepat, dan modal awal yang relatif kecil dibandingkan sektor lainnya. Berikut tabel 1.1 merupakan pertumbuhan UMKM di Provinsi Bali dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1. 1
Data Pertumbuhan UMKM Provinsi Bali tahun 2021-2023

No	Kabupaten/ Kota	Data UMKM Perdagangan		
		2021	2022	2023
1	Kab. Badung	7.805	16.016	10.137
2	Kab. Bangli	13.205	23.196	23.196
3	Kab. Buleleng	42.337	44.143	48.043
4	Kota Denpasar	11.126	11.126	10.616
5	Kab. Gianyar	30.377	30.455	30.486
6	Kab. Jembrana	34.732	54.575	54.973
7	Kab. Karangasem	47.220	24.236	31.760
8	Kab. Klungkung	25.212	25.492	23.610

9	Kab. Tabanan	3.014	25.416	26.144
Total		215.028	254.655	258.896

(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2023)

Pertumbuhan UMKM di Bali pada tahun 2023 di dominasi oleh UMKM yang berada di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Bangli, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. UMKM di sektor perdagangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan berperan aktif dalam distribusi barang dan jasa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Sektor perdagangan merupakan sektor dengan tingkat pertumbuhan yang paling mendominasi di dibandingkan dengan sektor lainnya seperti pertanian, aneka jasa dan lainnya. Berikut tabel 1.2 pertumbuhan UMKM sektor perdagangan menurut klasifikasi pada tahun 2023.

Tabel 1. 2
Pertumbuhan UMKM Sektor Perdagangan Provinsi Bali

Kabupaten/kota	Klasifikasi			
	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Kab. Badung	8.827	1.038	203	10.068
Kab. Bangli	21.518	1.519	23.196	23.196
Kab. Buleleng	43.239	3.843	961	48.043
Kota Denpasar	9.226	845	545	10.616
Kab. Gianyar	20.250	8.817	1.419	30.486
Kab. Jembrana	54.925	21	-	54.973
Kab. Karangasem	31.735	17	8	31.760

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2023)

Dilansir dari (Dinas Koperasi, 2023) UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki jumlah yang signifikan dan merata di setiap kategori usahanya dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Data dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor perdagangan di kabupaten Buleleng tercatat mencapai 48.043 unit usaha, hal ini mencerminkan tingginya tingkat pertumbuhan UMKM yang stabil di kabupaten

Buleleng. Pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di Bali dan Indonesia. UMKM di Kabupaten Buleleng telah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng ini maka penerapan SAK EMKM harus semakin di perhatikan oleh pemilik UMKM. Dengan demikian, fokus pada UMKM formal diharapkan memberikan hasil penelitian yang lebih valid dan relevan. Berikut adalah Tabel 1.3 klasifikasi UMKM pada semua sektor di Kabupaten Buleleng dari tahun 2022-2024.

Tabel 1. 3

Data jumlah UMKM Tiap Sektor Sekabupaten Buleleng tahun 2021-2024

No	Sektor	UMKM Formal Kabupaten Buleleng				
		2021	2022	2023	2024	April 2025
1.	Perdagangan	9.013	11.798	15.925	18,357	18.855
2.	Perindustrian	653	1.763	4.129	5.026	4.575
3.	Pertanian Non Pertanian	746	1.338	2.218	3.132	1.181
4.	Aneka Jasa	499	2.808	7.807	13.344	3.896

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng (2025), terlihat bahwa jumlah UMKM formal di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Sektor Perdagangan mendominasi dengan jumlah unit usaha mencapai 18.855 pada April 2025, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan merata dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor Perindustrian juga mengalami perkembangan signifikan, dari hanya 653 unit pada tahun 2021 menjadi 4.575 unit pada April 2025. Sementara itu, sektor Pertanian Non Pertanian sempat meningkat hingga 3.132 unit pada 2024, meskipun menurun menjadi 1.181 unit pada 2025. Adapun sektor Aneka Jasa berkembang pesat dari 499 unit pada 2021 menjadi 13.344 unit pada 2024, namun mengalami

penurunan menjadi 3.896 unit pada 2025. Pertumbuhan jumlah UMKM ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan semakin berkembangnya UMKM di Kabupaten Buleleng, maka penerapan SAK EMKM perlu mendapatkan perhatian lebih serius agar kualitas laporan keuangan UMKM dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan daya saing usaha. Sayangnya pertumbuhan UMKM yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pengetahuan serta kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan. Sebagian besar UMKM di Indonesia belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Penelitian ini difokuskan pada UMKM sektor perdagangan karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Buleleng. Aktivitas usaha perdagangan ditandai dengan frekuensi transaksi jual beli yang relatif tinggi sehingga memerlukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang baik sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu, karakteristik operasional UMKM perdagangan relatif lebih homogen dibandingkan sektor usaha lainnya, sehingga dapat meminimalkan perbedaan karakteristik operasional yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pembatasan objek penelitian pada sektor perdagangan bertujuan untuk menghasilkan analisis yang lebih spesifik, valid, dan mampu menggambarkan hubungan antara literasi keuangan, tingkat pendidikan, keterlibatan pengusaha perempuan, dan kualitas laporan keuangan secara lebih akurat.

Di samping pertimbangan tersebut, sektor perdagangan dipilih karena merupakan sektor yang relatif lebih fleksibel dan banyak diminati oleh pengusaha perempuan. Berbeda dengan sektor manufaktur yang memerlukan proses produksi yang lebih kompleks atau sektor pertanian yang bergantung pada musim dan kondisi alam, usaha perdagangan umumnya lebih mudah dijalankan karena tidak membutuhkan teknologi khusus, proses produksi yang rumit, maupun modal yang sangat besar. Fleksibilitas dalam mengatur waktu operasional serta kemudahan dalam memulai dan mengelola usaha memungkinkan perempuan tetap dapat menjalankan peran domestik sekaligus mengembangkan usahanya. Kondisi ini menjadikan perempuan memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan

keputusan usaha, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, sektor perdagangan dinilai paling relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan, dan keterlibatan pengusaha perempuan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.

Rendahnya kualitas laporan keuangan akan berdampak pada keberlangsungan usaha yang di jalankan. Hal ini juga terjadi pada UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan objek UMKM formal sebagai fokus penelitiannya. UMKM formal dipilih karena telah memiliki legalitas usaha seperti izin dan NPWP. UMKM formal juga memiliki kewajiban administratif serta menjadi sasaran pembinaan pemerintah terkait penerapan SAK EMKM. Selain itu, menurut (Devi et al., 2017), UMKM formal lebih memungkinkan untuk dianalisis karena memiliki dokumen pembukuan yang lengkap dan dapat diverifikasi

Selain menjadi sektor dengan jumlah pelaku usaha terbesar, sektor perdagangan juga merupakan sektor yang banyak melibatkan perempuan sebagai pelaku usaha. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 64,5% pelaku UMKM di Indonesia didominasi oleh perempuan (Ramadhan, 2021). Tingginya partisipasi perempuan dalam UMKM menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian keluarga maupun perekonomian nasional. Bahkan, perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilik usaha, tetapi juga terlibat secara langsung dalam pengelolaan operasional, pemasaran, pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan strategis usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan UMKM juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas perempuan dalam mengelola sumber daya usaha secara efektif.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, perempuan sering kali memiliki peran sentral dalam mengatur arus kas, melakukan pencatatan transaksi, mengelola modal kerja, hingga menyusun laporan keuangan usaha. Kemampuan tersebut menjadi penting karena laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang relevan dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan usaha, memperoleh akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing UMKM. Meskipun

memiliki peran yang besar dalam perekonomian, pengelolaan keuangan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, termasuk UMKM yang dikelola oleh perempuan. Berbagai program pendampingan dan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur, mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pencatatan akuntansi, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum mampu menggambarkan kondisi usaha secara akurat. Akibatnya, pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja usaha, mengakses pembiayaan, maupun mengambil keputusan bisnis yang tepat (Aripriatiwi, 2026).

Oleh karena itu, keterlibatan pengusaha perempuan menjadi faktor yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini. Tingginya dominasi perempuan pada sektor perdagangan menjadikan sektor ini relevan sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana keterlibatan perempuan dalam pengelolaan usaha dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan program pemberdayaan, pelatihan literasi keuangan, serta pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, sebagian besar UMKM di Kabupaten Buleleng masih belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Berdasarkan kondisi di lapangan, sebagian besar pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan keuangan sederhana berupa arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai alat untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran usahanya. Beberapa UMKM juga mencatat transaksi penjualan, pembelian, serta persediaan barang dagang, dan sebagian kecil telah menyusun laporan laba rugi sederhana. Namun, masih sangat sedikit UMKM yang menyusun laporan posisi keuangan (neraca) dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan

yang dilakukan masih berfokus pada transaksi kas dan belum mampu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, kewajiban, maupun ekuitas usaha secara lengkap. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting bagi pelaku UMKM karena dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja usaha sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK EMKM juga dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, investor, maupun pemerintah, serta mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM diperlukan sebagai pedoman yang sederhana agar UMKM mampu menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan secara lebih sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut data dari (Kementrian Keuangan RI, 2024) menyatakan bahwa hanya 22,5% UMKM yang memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM. Banyak UMKM yang menganggap pembukuan keuangan sebagai hal yang paling utama, banyak pelaku UMKM yang hanya berfokus pada marketing usahanya padahal pembukuan usaha juga merupakan hal yang penting. Membuat pembukuan usaha atau dalam akuntansi lebih di kenal dengan istilah laporna keuangan memeiliki manfaat yang penting seperti untuk mengontrol bisaya oprasional, menghitung laba rugi usaha, mengetahui jumlah hutang piutang usaha, menghitung pajak, mengontrol arus kas, mengalokasikan modal, meminimalisir resiko kehilangan aset, mengetahui perkembangan bisnis, mengotrol aset, dan mendapatkan pinjaman dari bank untuk mendapat bantuan modal (Kementrian Keuangan RI, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan et al., 2024) menunjukkan bahwa di UD Eka Buana, Desa Bulian, Kabupaten Buleleng, pencatatan keuangan masih berbasis kas dan belum mencakup penyusunan neraca, laporan laba rugi, dan CaLK sesuai SAK EMKM. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas laporan

keuangan masih rendah karena belum memenuhi standar akuntansi formal. Selaras dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Langi, 2025) menemukan bahwa banyak UMKM hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara sederhana tanpa menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, yang menandakan bahwa kualitas pelaporan masih belum memadai. Selain itu, penelitian di Kabupaten Karawang oleh (Lukitaa et al., 2025) membuktikan bahwa implementasi SAK EMKM, penyuluhan/pemberian informasi, dan persepsi pelaku usaha secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penerapan SAK EMKM secara utuh untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, terutama di daerah seperti Buleleng, di mana praktik pencatatan masih sangat sederhana.

Penerapan SAK EMKM seharusnya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan lengkap, mencakup neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta dapat dibandingkan antar periode untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan posisi keuangan. Namun, kondisi yang terjadi di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai standar tersebut. Akibatnya, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan sederhana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2021), sebagian besar UMKM di Buleleng hanya mencatat transaksi dalam bentuk sederhana antara pemasukan dan pengeluaran terdapat pula yang sama sekali tidak melakukan pencatatan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Krisnayanti et al., 2024) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng.

Pelaku UMKM di Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng, menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan yang dapat menghambat keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Salah satu tantangan utama adalah pencampuran antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, sehingga pelaku UMKM kesulitan dalam mengevaluasi kinerja usaha yang dijalankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih rendah, baik dari segi kelengkapan maupun kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Banyak

pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, padahal pencatatan yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Suarmanayasa, 2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng belum menyusun laporan keuangan secara sistematis karena keterbatasan pemahaman akuntansi dasar. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Wahyuni, 2020), bahwa implementasi SAK EMKM di Buleleng masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang memadai.

Kesulitan modal UMKM di Kabupaten Buleleng meningkat sebesar 25,7% setelah pandemi COVID-19, yang menunjukkan dampak signifikan terhadap permodalan UMKM di daerah tersebut (Merta Widiastiti et al., 2024). Rendahnya kualitas laporan keuangan ini tidak hanya menghambat kemampuan UMKM dalam memenuhi standar SAK EMKM, tetapi juga membuat mereka kesulitan memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan atau investor. Kesulitan akses pendanaan tersebut dapat menghambat pengembangan usaha bahkan berpotensi menyebabkan kebangkrutan atau gulung tikar bagi UMKM yang tidak mampu memenuhi kebutuhan modal usaha secara tepat waktu.

Pemerintah Indonesia telah mendorong pengembangan UMKM dalam beberapa tahun terakhir melalui berbagai kebijakan, termasuk penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Termasuk di Kabupaten Buleleng penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UMKM, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan dapat diandalkan. Namun, implementasi SAK EMKM di kalangan UMKM, khususnya di sektor perdagangan, masih menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui SAK EMKM secara utuh, sehingga laporan keuangan cenderung dibuat secara sederhana dan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Kamilah & Arafat, 2025).

Kualitas laporan keuangan UMKM mencerminkan kesesuaian antara laporan yang di buat dengan kualitas yang di tetapkan, tingkat keandalan dan relevansi informasi keuangan yang disajikan dalam mendukung pengambilan

keputusan ekonomi, kualitas laporan keuangan umumnya diukur berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian yang dilakukan oleh (Sadiqin, 2025) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti kompetensi pelaku usaha, karakteristik individu, dan pemahaman akuntansi. Rendahnya kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan keuangan dan belum optimalnya penerapan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Pakpahan, 2020) menegaskan bahwa laporan keuangan UMKM yang disusun sesuai dengan SAK EMKM memiliki kualitas yang lebih baik dan mampu meningkatkan kepercayaan pihak eksternal. Temuan ini memperkuat posisi kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen yang tepat karena dipengaruhi oleh perilaku dan karakteristik pelaku UMKM.

Meskipun memiliki peran krusial dalam perekonomian lebih dari 45% UMKM tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik (Luckieta, 2025). Faktor utama dari rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM adalah lemahnya literasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha. Literasi keuangan yang memadai sangat penting agar pelaku UMKM mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sebagaimana diatur dalam SAK EMKM. Masih lemahnya sistem pencatatan keuangan menjadi kendala utama dalam memperoleh akses pembiayaan yang maksimal, sehingga membatasi pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (Kinyanjui et al., 2017).

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (Masithah et al., 2023) (SNLIK) 2024 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional berada pada angka 65,43%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 75,02%. Namun demikian, terjadi kesenjangan cukup besar antara wilayah perkotaan dengan literasi 69,71% dan wilayah perdesaan yang hanya 59,25% (OJK, 2024). Mengingat Kabupaten Buleleng didominasi oleh wilayah perdesaan, kondisi ini menggambarkan potensi rendahnya literasi keuangan masyarakat setempat. Penelitian yang dilakukan oleh (Wiranata, 2023), menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Kabupaten Buleleng hanya mencapai 32,4%, jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Bali seperti

Badung (38,23%) dan Gianyar (38,0%). Fakta ini menegaskan bahwa banyak pelaku UMKM di Buleleng masih memiliki pemahaman terbatas mengenai manajemen keuangan, produk keuangan formal, serta pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Budiasni, 2023) di Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Pelaku usaha dengan tingkat literasi yang baik lebih mampu mengelola arus kas, menyusun laporan, dan memperoleh akses pembiayaan. Literasi keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya pengelolaan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Lusardi & Mitchell, 2014) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap aspek keuangan seperti pencatatan, pengelolaan arus kas, dan pengambilan keputusan keuangan, berkontribusi terhadap tingginya tingkat kegagalan usaha. Selain itu UMKM sering tidak membedakan antara pengelolaan keuangan usaha dengan pengelolaan keuangan rumah tangga atau pribadi (Suras et al., 2024). Dimana seharusnya UMKM bisa mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, namun dengan tidak ada laporan keuangan yang berkualitas akan mempersulit mendapat akses pendanaan tersebut.

Faktor-faktor lain yang memengaruhi rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM adalah karakteristik pengusaha seperti tingkat Pendidikan dan keterlibatan pengusaha perempuan. Tingkat pendidikan memiliki peran penting, karena semakin rendah tingkat pendidikan pengusaha, semakin besar permasalahan yang muncul dalam pencatatan keuangan, yang berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan (Myeko & Madikane, 2019). Selain itu, keterlibatan pengusaha Perempuan turut memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan, di mana penelitian menunjukkan bahwa perempuan pada umumnya memiliki tingkat kehati-hatian lebih tinggi dalam pengambilan keputusan finansial dibandingkan laki-laki, sehingga berpotensi menghasilkan laporan keuangan yang lebih teliti dan akurat (Powell & Ansic, 1997). Dengan demikian, Tingkat Pendidikan dan keterlibatan pengusaha Perempuan menjadi variabel penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM dan perlu diperhatikan dalam penelitian.

UMKM di Kabupaten Buleleng sebagian besar dijalankan oleh pelaku usaha dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang bervariasi, sehingga pemahaman mereka terhadap akuntansi dan pencatatan keuangan umumnya masih rendah dan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Devi et al., 2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan UMKM di Buleleng dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Penelitian yang dilakukan oleh (Mohamadi, 2025) juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha menengah di Buleleng memahami dasar akuntansi dan SAK EMKM, implementasi konsisten masih memerlukan dukungan sosialisasi dan pelatihan. Demikian pula, studi (Marjohan et al., 2023) menemukan bahwa banyak UMKM di Cianjur masih melakukan pencatatan manual tanpa menyusun laporan lengkap sesuai standar, sehingga belum memenuhi komponen laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Padahal, laporan keuangan UMKM penting untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan, dimana SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi sederhana yang relevan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan utama menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta catatan pendukung (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Selain itu karakteristik pelaku usaha dan faktor perilaku seperti *overconfidence*, *anchoring*, serta tekanan waktu turut memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada SME, yang dapat menyebabkan berkurangnya keakuratan informasi keuangan (Wikipedia, 2025).

Selain pendidikan, keterlibatan pengusaha perempuan juga turut memengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Perbedaan pengelolaan keuangan antara laki-laki dan perempuan mencerminkan variasi dalam karakteristik psikologis, gaya kepemimpinan, serta pendekatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengusaha perempuan cenderung lebih berhati-hati, teliti, dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Zalata & Abdelfattah, 2021) menyebutkan bahwa perempuan, terutama dalam peran pengawasan, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menghindari risiko serta lebih sadar terhadap konsekuensi dari pelaporan yang tidak sesuai standar. Mereka juga lebih peka

terhadap detail informasi, sehingga berpotensi memperkuat akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan.

Perbedaan cara pengelolaan keuangan antara laki-laki dan perempuan di tingkat manajerial dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena perempuan lebih menekankan pada kejujuran informasi dan memiliki kemampuan monitoring yang kuat terhadap potensi manipulasi laporan (Orazalin, 2020). Hal serupa juga diungkapkan oleh (Ghaleb et al., 2021), yang menemukan bahwa keberadaan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan mampu menurunkan praktik *earnings management*, baik akrual maupun *real*. Temuan-temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengusaha perempuan memiliki potensi besar dalam meningkatkan integritas dan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam konteks UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng, penting untuk mengkaji apakah keterlibatan pengusaha perempuan, berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM.

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh literasi keuangan atau Tingkat Pendidikan dan keterlibatan pengusaha Perempuan secara terpisah. Belum banyak studi yang secara komprehensif mengkaji interaksi antara literasi keuangan dan, tingkat pendidikan dan keterlibatan pengusaha Perempuan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM, khususnya dalam konteks penerapan SAK EMKM di sektor perdagangan. Selain itu, riset yang secara spesifik dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng juga masih sangat terbatas, padahal daerah ini menunjukkan pertumbuhan UMKM yang signifikan namun tidak di sertai dengan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menimbulkan kesenjangan (*research gap*) yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Sejumlah inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, seperti pelatihan oleh OJK dan Dekranasda Bali melalui webinar bertema “Edukasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Keuangan”(Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, 2025). Webinar yang di telah di lakukan belum sepenuhnya optimal untuk meningkatka kesadaran masyarakat pentingnya laporan keuangan yang berkualitas, hal ini di karenakan kegiatan ini bukan kegiatan berkelanjutan yang di lakukan dan tidak melibatkan semua pelaku UMKM.

Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan UMKM, khususnya di sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan karakteristik pengusaha seperti jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng, dengan mengacu pada standar SAK EMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana literasi keuangan, tingkat pendidikan dan keterlibatan pengusaha perempuan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM khususnya di sektor perdagangan. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teori. Melalui pendekatan kuantitatif eksplanatori, data di kumpulkan dari pelaku UMKM yang berfokus pada UMKM Perdagangan di Kabupaten Buleleng dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menilai pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan dan keterlibatan pengusaha perempuan terhadap kualitas laporan keuangan yang di susun sesuai SAK EMKM. Temuan penelitian ini menjadi bukti empiris yang dapat memperkaya literatur akuntansi UMKM di Indonesia, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan pembinaan yang lebih terarah guna.

1.2 Identifikasi Masalah

- a) Banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya pencatatan transaksi, fungsi laporan keuangan, dan pengelolaan keuangan usaha yang baik, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih tidak memenuhi standar.
- b) Meskipun pemerintah telah menerapkan beberapa kegiatan untuk UMKM untuk mendukung proses pencatatan keuangan, namun sebagian besar UMKM belum menerapkan karena kurangnya pemahaman dan pendampingan.
- c) Sebagian besar pelaku UMKM masih menggabungkan penggunaan uang pribadi dan usaha, yang menyebabkan pencatatan tidak valid dan laporan keuangan tidak dapat diandalkan.
- d) Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor UMKM yang banyak melibatkan perempuan sebagai pemilik maupun pengelola usaha, namun

tingkat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan keuangan usaha masih beragam.

- e) Sebagian pengusaha perempuan belum terlibat secara optimal dalam proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemanfaatan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif SAK EMKM?
- 2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif SAK EMKM?
- 3) Apakah keterlibatan pengusaha perempuan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif SAK EMKM?

1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan, dan keterlibatan pengusaha perempuan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng, dengan kualitas laporan keuangan yang diukur berdasarkan kepatuhan terhadap penerapan SAK EMKM.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif SAK EMKM
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif SAK EMKM

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah keterlibatan pengusaha Perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM perdagangan di Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif SAK EMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, maka manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan UMKM, terutama dalam konteks laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori-teori yang telah ada mengenai hubungan antara literasi keuangan, karakteristik pengusaha, dan kualitas laporan keuangan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengimplementasian ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta memperluas wawasan peneliti dalam hal pengaruh literasi keuangan, karakteristik pengusaha dan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM dalam rangka menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan UMKM.

b. Bagi Pemilik UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dan meningkatkan kesadaran pengusaha UMKM tentang pentingnya kualitas laporan keuangan dan bagaimana hal itu dapat berdampak pada keberlangsungan usaha, serta dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh UMKM untuk

memperbaiki kualitas laporan keuangan mereka, seperti meningkatkan literasi keuangan, memperbaiki sistem pencatatan, dan memanfaatkan teknologi informasi

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM.

d. Bagi Lembaga Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi lembaga universitas dalam bentuk penguatan peran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan ajar kontekstual dalam perkuliahan, referensi ilmiah bagi mahasiswa dan dosen, serta dasar penyusunan program pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan literasi keuangan dan pendampingan akuntansi UMKM. Dengan demikian, universitas dapat menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara lebih terpadu.

